

## Keadilan Gender dan Hak-hak Reproduksi di Pesantren

Maya Fitria<sup>1</sup>

Avin Fadilla Helmi<sup>2</sup>

Fakultas Psikologi  
Universitas Gadjah Mada

### Abstract

*This study was intended to understand how the phenomenon of gender equity and reproductive rights in pesantren using the theoretical framework of attitude. The research was conducted in a qualitative approach through a case study method. Sources of data consisted of 10 interviewed subjects, 18 FGD subjects, and survey of 327 subjects. Subjects were varying from pesantren's supervisor, teacher, manager and doctor of pesantren's Community Health Center, and santri itself. Data was also obtained from the observation of the supervisors' behaviors and the pesantren's environment. Subjects tended to agree in distinguishing the male and female gender role based on what's happening, different from the religious teachings they learned which tended to be gender fair. Regarding with women reproductive cases, subjects tended to be gender biased based on the interpretation of religious texts although they admitted that it was hard to be manifested in behavior, example: preferring monogamous marriage, never beating women, and not promoting early marriage. Subjects agreed and understood that women had different, and yet more complex anatomical processes and functions, however their health service were just considered the same as men.*

*Keywords: gender equity, reproductive rights, pesantren, attitude*

Salah satu isu penting mengenai ketidakadilan sosial yang berkembang di masyarakat saat ini adalah permasalahan kesetaraan gender. Permasalahan yang berhubungan dengan ketidakadilan sosial hampir selalu dapat dikaitkan dengan permasalahan gender. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi topik yang selalu hangat dan harus terus dikaji, meskipun ide mengenai kesetaraan terse-

but telah dideklarasikan di Kairo pada Deklarasi Universal HAM Islam atau Cairo Declaration of Human Right in Islam (CDHRI-1990) yang disusun para sarjana, alim ulama dan pakar hukum Islam terkemuka dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) (Clark, 2004). Dikatakan oleh Fakih (2004), bahwa perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun demikian, pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan.

<sup>1</sup> Korespondensi dengan penulis dapat dilakukan melalui: maya\_fmh@yahoo.com

<sup>2</sup> Atau dengan menghubungi: avinpsi@yahoo.com atau avinpsi@ugm.ac.id



Perbedaan gender merupakan produk pemaknaan masyarakat pada kondisi sosial budaya tertentu mengenai sifat, status, posisi dan peran laki-laki dan perempuan terkait ciri-ciri biologisnya. Beall dan Stearnberg (1993) berpendapat bahwa kategorisasi tersebut harus disosialisasikan dan diterima oleh individu, sehingga nantinya akan melekat sebagai bagian dari karakteristik kepribadiannya. Sesuai dengan karakteristik yang melekat tersebut, berbagai hal harus dikaitkan, semisal pekerjaan tertentu yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ada pembatasan dalam hal peran yang dinilai cocok bagi laki-laki dan perempuan. Apabila hal ini benar-benar terjadi maka secara kognitif akan terbentuk skema. Skema (*schema*) adalah gambaran dalam kognisi seseorang yang digunakan untuk proses kategorisasi, mengarahkan perhatian pada informasi yang relevan, menyediakan sebuah kerangka untuk mengevaluasi informasi, dan menyediakan kategori-kategori untuk menyimpan informasi (Brigham, 1991). Dalam kaitannya dengan gender, Bem (dalam Cross dan Markus, 1993) mengkonsepsikannya sebagai skema gender (*gender schema*). Fakta bahwa laki-laki dan perempuan berperilaku, menempati posisi, dan berperan berbeda memperkuat skema gender tersebut. Perbedaan ini terus berlangsung hingga mengarah pada diskriminasi yang merugikan perempuan, ketidakadilan perlakuan berupa marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja berlebih (Fakih, 2004).

Pertimbangan penting yang menjadi dasar penelitian ini adalah beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa relasi, peran, dan posisi laki-laki dan perempuan yang cenderung tidak adil gender membuat perempuan rentan mendapatkan kekerasan dari laki-laki, secara fisik maupun psikis, terutama dalam bentuk kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT). KDRT yang dilakukan seringkali terkait dengan isu reproduksi perempuan, tepatnya jaminan pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan (Sciortino & Smyth, 1997; Hayati, 1999; Browner, 2000; Hakimi, Hayati, Marlinawati, Winkvist, & Ellsberg, 2001), antara lain hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, serta hak menentukan jumlah dan jarak anak.

Pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan tidak dapat dipisahkan oleh bagaimana laki-laki dan perempuan diposisikan. Relasi timpang dan tidak adil bagi perempuan mempersulit tercapainya reproduksi yang sehat (Abdullah, 2001). Pada dasarnya setiap manusia dijamin hak hidup dan kesejahteraan fisik, mental, serta sosialnya. Secara biologis, konstruksi dan fungsi anatomis tubuh antara laki-laki dan perempuan memang beda. Oleh karenanya, akan sangat logis apabila laki-laki dan perempuan membutuhkan perlakuan yang berbeda pula dalam pemeliharannya. Hanya saja, yang terjadi adalah penyamarataan perlakuan yang berujung pada pengabaian dan kebijakan yang meremehkan fungsi-fungsi reproduksi perempuan. Sebagai akibatnya, perempuan mengalami proses-proses reproduksi yang tidak sehat, yang bahkan dapat berujung pada kematian perempuan. Secara spesifik, data statistik menunjukkan bahwa angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai 307 per 100.000 kelahiran (Kompas, Mei 2008). Angka yang dihimpun dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2003 menunjukkan sekitar 15 ribu ibu meninggal karena melahirkan setiap tahun atau 1.279 setiap bulan, atau 172 setiap pekan, atau 43 ibu setiap hari, atau dengan kata lain hampir dua orang ibu meninggal setiap jam. Ditegaskan oleh Dewi Fortuna Anwar (Kompas, Mei 2008), seorang

peneliti LIPI, bahwa penyebab tingginya angka kematian ibu ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang masih kental, di mana perempuan tidak memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Selain itu, kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya akses terhadap informasi, tingginya peranan dukun dan terbatasnya layanan medis modern juga turut andil sebagai penyebab masalah.

Pada masyarakat yang religius, ternyata tuntutan dan kebutuhan atas reproduksi sehat yang didasarkan atas pemahaman relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan justru dipandang secara dikotomik, dipisahkan bahkan dipertentangkan dengan ketaatan masyarakat terhadap agamanya (Soebahar & Usman, 1999). Seharusnya hal tersebut berjalan bersamaan dan saling melengkapi karena pada dasarnya ajaran agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan, keadilan dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Bilamana agama dirasa menghambat hubungan interaksi harmonis antara sesama manusia, maka hal itu terkait penafsiran ajaran agama yang bias (Umar, 1999). Oleh sebab inilah maka wacana mengenai hak-hak reproduksi perempuan atas dasar keadilan dan kesetaraan gender masih sensitif dibicarakan dalam komunitas religius, salah satunya pesantren.

Penelitian-penelitian yang mengaitkan gender, kesehatan reproduksi, dan pesantren selama ini menyorot elemen sentral dalam pesantren, yaitu terutama kyai. Penelitian Marhumah (2009) menghasilkan bahwa pesantren masih cenderung mensosialisasikan ketidakadilan gender dalam pengajaran dan pendidikannya, salah satunya karena kuatnya dominasi peran tokoh sentral dalam pesantren yaitu kyai dan nyai dalam sosialisasi nilai dan ajaran yang masih bias gender. Penelitian Soebahar dan Usman (1999) menyimpulkan adanya pengaruh kyai terhadap pandangan

orang-orang di sekitarnya yaitu nyai, santri, dan masyarakat terkait wacana hak-hak reproduksi perempuan.

Penelitian ini rencananya dilaksanakan di pesantren tempat peneliti tinggal. Penelitian ini adalah sebuah *self critic*, usaha untuk mencermati lebih dalam permasalahan-permasalahan yang dalam diri dan lingkungan sekitarnya sehingga dapat memberikan kontribusi pengembangan diri dan lingkungan ke arah yang lebih baik. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai keadilan gender dan hak-hak reproduksi perempuan di Pesantren Krapyak ini. Rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena keadilan gender di pesantren? Bagaimana pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan di pesantren?

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian dengan studi kasus merupakan pengujian intensif dengan menggunakan berbagai sumber bukti yang bisa kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya terhadap satu entitas yang terbatas ruang dan waktu. Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal (*the single instrumental case study*) yaitu mengenai keadilan gender dan hak-hak reproduksi di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Studi kasus semacam ini menekankan peneliti untuk memfokuskan pada apa yang dapat dipelajari secara khusus pada tema atau kasus tertentu. Penekanannya adalah pemaksimalan pemahaman tentang realitas yang dituju, dan tidak diarahkan untuk mendapatkan generalisasi.

Sumber data primer penelitian ini adalah *stakeholder* pembelajaran dan layanan

kesehatan di dalam pesantren yaitu Kyai dan Nyai: pengasuh utama dan pengasuh kompleks; guru dan santri tingkat madrasah Aliyah (setingkat SMA), Tsanawiyah (setingkat SMP), dan Ma'had Aly (setingkat universitas); kepala bidang akademis di madrasah; pengelola dan dokter di Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) milik pesantren. Teknik pemilihan sumber data dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang berarti pencarian subjek informan yang dapat memberikan penjelasan yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan metode survei menggunakan kuesioner yang diberlakukan sebagai wawancara tertulis. Hasil observasi, wawancara, FGD, dan kuesioner diverifikasi dengan teknik triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data.

*Purposive sampling* dilakukan dengan mempertimbangkan ketercukupan dan kejenuhan data. Jumlah pengasuh ada 17 orang (7 laki-laki, 10 perempuan), yang diwawancara 4 orang (2 laki-laki, 2 perempuan). Jumlah dokter ada 3 orang, yang diwawancara 2 orang. Guru yang diwawancarai adalah kepala sekolah dan ketua bidang akademis. Jumlah santri ada 1280 (MA dan MTs kurang lebih 1000 dan sisanya santri mahasiswa). Penggalan data dilakukan dengan FGD pada 8 santri putri MA dan 10 santri putri MTs serta 327 santri pengisi kuesioner (MTs Putra 86, MTs Putri 56, MA Putra 57, MA putri 72, Mahasiswa 27, Mahasiswi 29).

Proses analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini meliputi proses *bracketing*, *horizontalizing*, *meaning units* untuk mendapatkan deskripsi *textural*, *imaginative variation*, untuk mendapatkan deskripsi *structural*, dan memadukan deskripsi *textural* dan *structural* menjadi suatu makna yang universal dan mewakili res-

ponden secara keseluruhan. Validitas hasil penelitian dengan menggunakan *intersubjective validity*.

## Hasil

### a. Keadilan gender

#### 1) *Aspek sikap*

Secara umum, keragaman sikap yang ada pada para pengasuh dan guru juga termanifestasi pada sikap para santri. Sikap beberapa guru dan pengasuh yang cenderung membedakan peran gender laki-laki juga diadopsi sebagian besar santri. Sikap ini terutama berasal dari evaluasi atas fakta-fakta yang terjadi di sekitar mereka tentang bagaimana perempuan dalam berperilaku maupun diperlakukan selama ini. Meskipun demikian, sikap yang dipegang tidak menjadi ekstrim karena mereka juga berpendapat adalah tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan untuk menjadi setara dalam mengembangkan dan menyeimbangkan potensinya, antara lain rasionalitas dan perasaannya. Pendapat ini berasal dari teks ajaran agama yang dipelajari di pesantren.

Dalam hal ini, terdapat dua sumber sikap yang berbeda yaitu hasil internalisasi ajaran agama yang cenderung adil gender berhadapan dengan hasil evaluasi terhadap fakta-fakta di lingkungan yang terkonstruksi secara bias terhadap beberapa peran gender. Dua sumber sikap dengan substansi isi yang cenderung kontradiktif ini akan melemahkan intensitas sikap sehingga menghambat sikap untuk menjadi ekstrim dan kuat. Menurut Petty dan Krosnick (1995), sikap yang kuat akan berdampak pada munculnya perilaku. Hanya saja, kemunculannya menjadi perilaku akan sangat tergantung pada faktor-faktor mediator sikap-perilaku yang lain.

## 2) Aspek Perilaku dan Kebijakan

Kesempatan dan akses pendidikan yang tersedia secara umum relatif sama untuk santri laki-laki dan perempuan. Hal ini terutama terlihat dari capaian prestasi akademis mereka dan optimisme akan harapan masa depan mereka terkait aktualisasi diri dalam prestasi, motivasi untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau lebih memilih bekerja daripada langsung menikah setelah lulus kuliah. Hanya saja, beberapa fasilitas kurang bisa diakses secara optimal oleh santri putri karena kebijakan yang berbeda, yaitu masalah keluar malam dan akses internet yang lebih terbuka bagi santri laki-laki. Unikinya, pemberlakuan kesetaraan perlakuan gender pada beberapa akses fasilitas justru malah membuatnya tidak berfungsi secara optimal. Salah satu contohnya adalah perpustakaan. Perpustakaan yang dijadikan satu antara laki-laki dan perempuan justru membuat santri perempuan merasa tidak leluasa dan nyaman. Beberapa fasilitas, seperti perpustakaan misalnya, sebaiknya dibedakan antara laki-laki dan perempuan, atau lebih didekatkan ke asrama sehingga dapat diakses disela-sela istirahat mereka karena aktivitas di madrasah yang sudah cukup padat.

Sikap terhadap akses dan kesempatan pendidikan menguat karena memiliki beberapa sumber sikap yang berbeda namun cenderung sama, yaitu bersumber dari internalisasi nilai ajaran agama, evaluasi terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar, serta pengalaman langsung. Hal ini tentu saja berdampak pada kekuatan bahkan keekstriman sebuah sikap.

Persepsi terhadap evaluasi lingkungan sosial terhadap akses dan kesempatan pendidikan juga terkesan sama. Persepsi tersebut cenderung positif dan sesuai dengan sikap yang terbentuk yaitu berasal dari

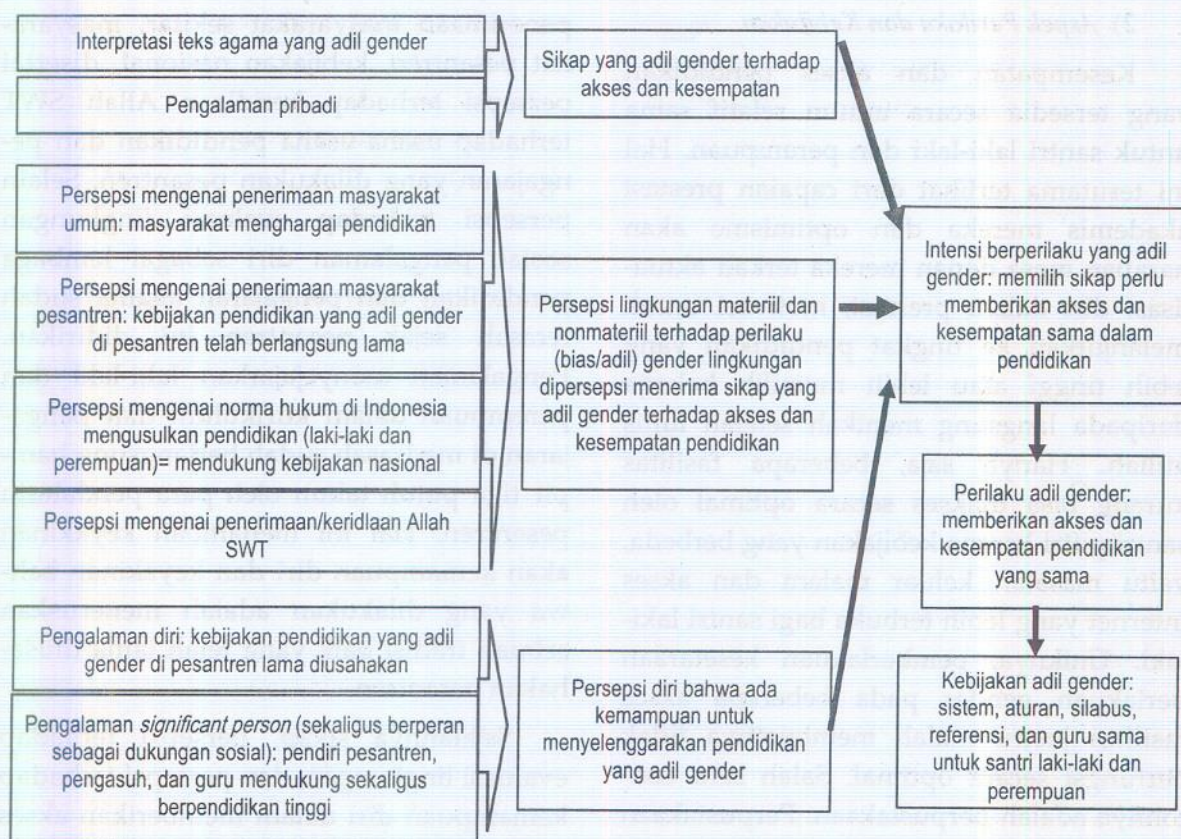
penerimaan masyarakat sekitar, masyarakat pesantren, kebijakan nasional, disertai persepsi terhadap keridlaan Allah SWT terhadap usaha-usaha pendidikan dan pengajaran yang dilakukan pesantren. Selain persepsi terhadap evaluasi lingkungan sosial, pengalaman diri sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama sudah terasah sejak pesantren ini didirikan. Pengalaman menyejajarkan laki-laki dan perempuan dalam kurikulum dan pengajaran di madrasah sudah berlangsung hampir tiga puluh tahun oleh para pendahulu pesantren. Hal ini menambah keyakinan akan kemampuan diri dan keyakinan bahwa yang dilakukan adalah meneruskan sebuah tradisi baik yang telah lama diusahakan pesantren.

Sejalannya sikap, persepsi terhadap evaluasi lingkungan, dan persepsi terhadap kemampuan diri dalam memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan menguatkan sikap yang kemudian termanifestasi menjadi sebuah perilaku. Ketika sebuah sikap telah muncul sebagai perilaku dari sebagian besar orang, tuntutan untuk membuatnya lebih terjamin secara sistem juga menguat. Dalam sebuah organisasi, jaminan secara sistemik tersebut termanifestasi dalam sebuah kebijakan. Gambaran dinamika sikap menjadi perilaku dan kebijakan terkait akses dan kesempatan pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.

## b. Hak-hak reproduksi

### 1) Aspek kultural

Semua subjek menyepakati bahwa hak-hak reproduksi perempuan perlu dijamin pemenuhannya. Penggambaran aspek kultural hak-hak reproduksi dengan penggalan pendapat mengenai pemilihan pasangan hidup dapat disimpulkan bahwa sebagian besar merasa bahwa hak *ijbar* (hak orang tua/bapak untuk menikahkan anak



Gambar 1. Hubungan Sikap-Perilaku: Akses dan Kesempatan Pendidikan di Pesantren

perempuannya) masih diperlukan. Hanya saja, semua sepakat bahwa perempuan layak dan harus dimintai pendapat dan pertimbangan. Begitu pula dalam hal pernikahan dini, mayoritas sependapat bahwa pernikahan dini bukan hal yang bijak untuk dilakukan mengingat hak dan harapan pencapaian cita-cita pendidikan anak.

Setiap komunitas tidak mungkin menafikan keharusan interaksi sosialnya dengan komunitas yang lain. Komunitas terjadi karena ikatan sosial antar individu di dalam masyarakat. Kehidupan personal seseorang tidak dapat terpisah dari keterhubungan dan ketergantungan dengan orang lain, begitu pula komunitas. Komunitas satu akan terhubung dengan komunitas yang lain dan membentuk masyarakat. Pesantren sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat awam adalah komunitas yang cenderung tradisional dan tertutup. Pesantren Krapyak yang menjadi objek

penelitian ini relatif terbuka dan mudah dalam hal akses media maupun interaksi sosial secara langsung, dan melalui dunia maya. Wacana dari luar pesantren, dari lingkungan masyarakat sekitar maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas misalnya, tentu akan lebih mudah masuk dan mewarnai pemikiran, sikap, tindakan, bahkan kebijakan di dalam pesantren. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat pesantren akan mempertimbangkan kondisi dan tuntutan masyarakat sekarang dalam interpretasi dan amalan ajaran agama. Sebagaimana penolakan terhadap praktik pernikahan dini dan penerapan yang lebih bijak terhadap hak *ijbar* seorang bapak terhadap anak perempuan. Telah ada kesadaran bahwa perilaku reproduksi yang beresiko salah satunya adalah karena pernikahan dini dan pernikahan yang dipaksakan. Kesadaran semacam ini mengurangi resiko timbulnya berbagai masalah kese-

hatan, sosial, dan ekonomi yang dapat terjadi akibat semakin awalnya perilaku seksual seseorang (Kaplan, Erickson, & Reyes, 2002).

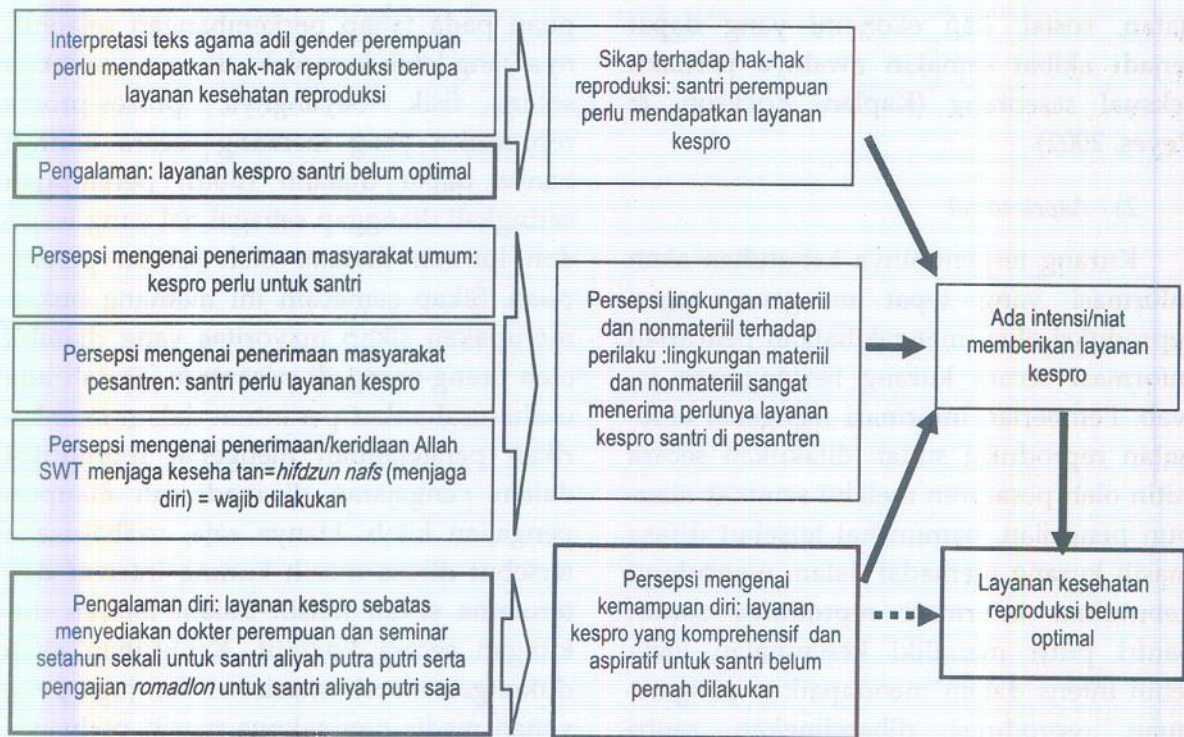
## 2) Aspek sosial

Kurang terpenuhinya kebutuhan akan informasi yang tepat mengenai organ reproduksi akan mengakibatkan pencarian informasi secara kurang bertanggung jawab. Pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi sudah dilakukan secara rutin oleh pesantren melalui seminar maupun pengajian, namun hal tersebut dirasa masih kurang memadai dalam mencukupi kebutuhan informasi reproduksi santri. Santri putri memiliki kesempatan yang lebih intens dalam mendapatkan pengetahuan reproduksi dibandingkan santri putra. Keberadaan dokter perempuan yang memang dimaksudkan untuk melayani para santri putri dalam mengatasi keluhan reproduksi ternyata juga belum dapat memberi manfaat secara optimal.

Pengetahuan adalah unsur pertama yang dipersiapkan dalam mengurangi kecemasan dan kekhawatiran seorang perempuan dalam menghadapi proses-proses reproduksinya. Menurut Burns, Lovich, Maxwell, dan Shapiro, (1999) jika anak perempuan praremaja telah diberitahu tentang menstruasi sebelum ia benar-benar mengalaminya, mungkin dirinya akan gembira ketika saat itu tiba, karena dengan demikian ia tahu benar bahwa dirinya tengah dalam proses menapak masa awal ke arah kedewasaan. Mereka yang tidak pernah mendapat keterangan apa-apa tentang menstruasi bisa ketakutan ketika melihat darah mulai keluar dari vagina. Hal ini ditambah pula dengan ketidaknyamanan-ketidaknyamanan yang terjadi secara fisik pada saat menstruasi, sebelum, dan sesudahnya. Kemungkinan yang sama terjadi pada proses-proses reproduksi perem-

puan pada tahap perkembangan selanjutnya yang lebih kompleks dan menyakitkan secara fisik. Sayangnya, proses-proses reproduksi yang memang secara kodrati hanya dapat dialami tubuh perempuan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dialami oleh semua perempuan. Sikap semacam ini memang bukan merupakan sikap mayoritas yang diambil oleh orang-orang di pesantren. Sudah ada usaha-usaha dari pesantren dalam memberikan pengetahuan mengenai reproduksi dalam pengajaran di madrasah maupun pengajian kitab. Hanya saja, usaha-usaha tersebut dirasa masih kurang intensif dan terutama sekali masih dalam tataran dukungan secara kognitif. Kebutuhan akan dukungan moral emosional dan juga pelayanan medis nampaknya masih perlu untuk dipenuhi. Gambaran hubungan sikap dengan perilaku terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi santri di pesantren dapat dilihat pada gambar 2 bawah ini.

Sikap dukungan yang kuat terhadap layanan kesehatan reproduksi untuk santri sebagai perwujudan dari jaminan atas hak-hak reproduksi santri disokong pula oleh persepsi akan adanya evaluasi yang cenderung positif terkait dukungan lingkungan materiil dan immateriil di sekitar masyarakat pesantren mengenai pentingnya layanan kesehatan reproduksi. Hanya saja, kebijakan dalam layanan di klinik pesantren masih nampak merepresentasikan pandangan bahwa kebutuhan akan kesehatan organ tubuh perempuan sama saja dengan yang dibutuhkan laki-laki. Menurut De La Rey dan Kottler (1999), kebijakan yang *gender blind* dapat dikatakan sama saja dengan kebijakan pengabaian dan sebuah kelalaian (*omission*). *Gender blind approach* atau sebuah pendekatan yang tidak memperhatikan keadilan gender di dalamnya bukanlah sebuah pendekatan sama sekali (Grown, Gupta, & Pande, 2005).



Gambar 2. Hubungan Sikap-Perilaku: Pelayanan Kesehatan Reproduksi untuk Santri di Pesantren

Aspek sosial dari hak-hak reproduksi yang lainnya adalah terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dalam menjalani tugas reproduksi. Jawaban subjek guru dan pengasuh yang diwawancara terbagi atas dua macam jawaban. Jawaban guru aliyah, guru mahasiswa, dan pengasuh putra relatif sama yaitu bahwa keputusan itu berdasarkan pertimbangan bersama suami dan istri. Agak berbeda dengan jawaban tersebut, 2 (dua) subjek pengasuh putri dan seorang pengasuh putra menandakan bahwa keputusan terutama berada di tangan istri karena istri yang jauh lebih tahu kondisi fisik dan psikologisnya. Bila istri merasa sudah siap secara fisik dan psikis, proses reproduksi bisa dijalani. Ditambahkan oleh subjek pengasuh putri, bahkan dalam ajaran agama untuk menyusui pun adalah pilihan si ibu, bukan kewajiban meskipun itu sangat disarankan.

Berdasar hasil kuesioner, sesuai dengan pendapat sebagian besar guru dan

pengasuh, mayoritas santri lebih condong pada pendapat bahwa suami dan istri yang bertanggung jawab atas proses reproduksi perempuan, misal terkait keputusan pengaturan kehamilan.

Terkait masalah pengasuhan, meskipun semua subjek menjawab bahwa pengasuhan anak adalah tugas bersama suami dan istri, namun pada kenyataannya tugas tersebut lebih banyak dibebankan pada istri meskipun sama-sama bekerja. Beban ganda perempuan sepertinya masih dirasakan oleh perempuan para istri di pesantren. Sejalan dengan hal tersebut, mayoritas santri juga memiliki pandangan yang sama bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban suami dan istri. Mayoritas santri putra pun menyatakan siap ikut membantu pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak bila istri juga bekerja.

Pandangan seseorang memang belum tentu dapat terekspresikan dalam bentuk perilaku apalagi bila hal tersebut masih



sebagai praktik yang belum dilakukan oleh mayoritas orang di sekitarnya salah satunya terkait masalah kerja-kerja takberbayar (*unpaid work*) berupa kerja-kerja domestik dan pengasuhan anak. Survey yang dilakukan oleh *Social Cultural Survey* pada tahun 2000 di Belanda menghasilkan bahwa meskipun semakin banyak orang yang percaya bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya bersama-sama bekerja dalam sektor domestik berupa kerja-kerja takberbayar dalam kerumahtanggaan dan pengasuhan, namun realitasnya belum sama dengan opini tersebut (Duindam & Spruijt, 2002). Sejalan dan menguatkan hal ini, Chodorow (2002) berpendapat bahwa menjadi ibu dan keibuan (*mothering*), secara psikodinamika merupakan proses sekaligus siklus identifikasi ganda dari seorang perempuan yaitu sebagai ibu sekaligus sebagai anak. Sepakat dengan hal ini, menurut Duindam & Spruijt (2002), masalah ini bisa dikurangi bila telah muncul generasi yang tumbuh dan diasuh oleh orang tua secara bersama dan setara.

### 3) Aspek seksual

Aspek seksual hak-hak reproduksi ini untuk menggali informasi mengenai pendapat subjek di pesantren terkait hak-hak untuk memperoleh kenyamanan, keselamatan, dan terhindar dari kekerasan yang mengancam organ seksual seseorang dalam melakukan hubungan seks. Seluruh subjek yang diwawancarai memberikan jawaban yang serupa terkait dengan bahwa suami maupun istri harus sama-sama menikmati hubungan seksual. Terkait dengan konsep *nusyuz* dalam agama, satu orang subjek yaitu pengasuh putra menjawab bahwa dalam definisi agama *nusyuz* adalah pembangkangan istri terhadap suami. Subjek-subjek yang lain relatif berbeda jawabannya dengan mengatakan bahwa *nusyuz* adalah pembangkangan suami atau istri dalam hak dan kewajiban dalam kehidup-

an berumahtangga. Begitu pula dengan pemaknaan hadits yang memperbolehkan pemukulan istri yang melakukan *nusyuz*. Subjek tersebut memaparkan bahwa itu memang diperbolehkan dalam agama asal di organ tubuh yang tidak membahayakan dan itu adalah upaya terakhir. Subjek-subjek lain cenderung menafikan unsur pemukulan tersebut dan lebih menegaskan bahwa komunikasi yang baik adalah pilihan utama. Para istri di jaman sekarang sudah lebih maju dalam pemikiran, pergaulan, dan ekonomi sehingga mereka sudah terbiasa untuk hidup egaliter salah satunya terbiasa mendiskusikan permasalahan apa saja sehingga pemukulan bukanlah sebuah pilihan. Lagi pula, suami harus berfikir dua kali bila melakukan pemukulan terhadap istri karena sekarang hal tersebut dapat masuk dalam pasal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ditambahkan oleh salah seorang pengasuh putra bahwa menurutnya belum pernah ada kyai atau orang yang paham agama melakukan pemukulan terhadap istrinya. Yang biasanya melakukan pemukulan adalah justru orang-orang yang tidak terlalu paham agama.

Definisi menurut subjek santri cukup menarik. Subjek perempuan yang justru lebih banyak yang mendefinisikan *nusyuz* sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Di sisi lain, 60% santri laki-laki justru lebih memilih definisi *nusyuz* sebagai bukan hanya pembangkangan istri namun suami terhadap pasangannya terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam ikatan pernikahan. Sikap santri mahasiswa berbeda dengan santri aliyah dalam menyikapi teks agama yang terkait laknat terhadap istri bila menolak berhubungan badan dengan suaminya. Sikap santri aliyah lebih menyetujui hadits itu namun dengan syarat alasan yang logis seperti sakit. Sikap mahasiswa cenderung lebih seimbang antara

setuju tapi disertai alasan logis dengan pendapat bahwa suami maupun istri sama-sama mendapat laknat malaikat bila menolak berhubungan seksual dengan pasangannya tanpa alasan yang logis. Begitu pula, terkait teks al Qur'an terkait konsekuensi *nusyuz* yang bila ditafsirkan secara *leterlijk* berarti memukul, mayoritas santri terutama santri aliyah dan mahasiswi sepakat dengan penafsiran tersebut. Sebagian di antaranya tidak setuju, terutama justru santri mahasiswa, karena pemukulan mengandung unsur kekerasan.

Mencoba berada di tengah antara penafsiran ajaran yang ada dengan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada sepertinya menjadi jalan yang juga harus dipilih oleh santri sebagaimana para guru dan pengasuhnya. Kurang lebih setengah dari santri berpendapat bahwa berdiskusi dan menggauli istri dengan baik adalah sesuatu yang harus diutamakan namun seorang istri tetap harus mematuhi apapun perintah suami. Hanya saja, mayoritas dari mereka juga menyatakan tidak akan pernah memukul istri kalau sudah menikah nanti.

Isu terakhir yang dikedepankan terkait aspek seksual hak-hak reproduksi adalah terkait masalah poligami. Subjek pengasuh putri menolak poligami dengan alasan bahwa poligami sekarang sudah melenceng dari Alqur'an dan sunah Nabi karena lebih menekankan pada unsur biologis. Dalam Alqur'an maupun yang dicontohkan Nabi adalah bahwa pilihan poligami adalah atas dasar perlindungan terhadap janda dan anak yatim. Salah seorang pengasuh putra menyatakan setuju dengan poligami karena pada dasarnya lelaki memiliki potensi biologis yang memungkinkan untuk melakukan poligami dan ada legalitas dari agama. Hanya saja, beliau menekankan bahwa untuk poligami harus ada alasan yang dibenarkan oleh *syara'* atau agama, yaitu

karena ada kendala hubungan biologis atau karena untuk perlindungan janda dan anak yatim. Saat pengasuh putri ditanya apakah mereka mau dipoligami, mereka menegaskan bahwa tidak akan mau dipoligami dan memilih cerai misalnya. Salah satu dari pengasuh juga menegaskan bahwa jalan menuju surga buat suami istri tidak harus dengan cara yang menyakitkan satu pihak seperti poligami. Sebagian besar pendapat santri juga tidak menyetujui praktik poligami karena dianggap tidak memungkinkan bersikap adil secara materi maupun perasaan serta lebih banyak madlorot (bahaya/kesengsaraan) dari pada kemanfaatan untuk anak dan istri. Yang agak mencolok seperempat santri putra aliyah memilih pernyataan poligami dianjurkan menurut ajaran Islam karena merupakan sunnah Nabi dan separuh lebih memilih lebih baik melakukan poligami daripada dosa karena selingkuh hingga zina meskipun hanya minim sekali yang memilih pendapat bahwa poligami diperbolehkan untuk menyalurkan hasrat dan kemampuan biologis laki-laki yang melebihi perempuan.

Menurut Petty dan Krosnick (1995) salah satu yang menjadi kekuatan sikap adalah faktor *importance* yaitu seberapa jauh individu benar-benar peduli dan secara pribadi dipengaruhi oleh sikap tersebut. Terkait dengan masalah pemukulan dan poligami, semua subjek pengasuh putri tidak hanya memanasifasikan pendapatnya secara kognitif tapi juga ada penegasan secara rasa dan kemungkinan perilaku yang akan diambil. Biasanya, dalam kaitan hukum agama, unsur rasa agak diabaikan atau paling tidak mendamaikannya dengan bersikap yang tidak terlalu ekstrim menolak atau menerima sebagaimana yang pensikapan yang dipilih oleh para subjek laki-laki dan sebagian besar subjek santri. Kenyataan bahwa hal tersebut tercantum dalam teks Al Qur'an dan juga sesuatu

yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw ikut menguatkan pilihan sikap tersebut. Di sisi lain, praktik poligami ditolak oleh para pengasuh putri dengan penolakan pasti.

Terkait dengan faktor *importance* (makna), ada tiga komponen utama yang terkandung di dalamnya, yaitu *self interest* (sejauh mana sikap mempengaruhi kehidupan atau tujuan individu), identifikasi sosial (sejauh mana sikap mempengaruhi kelompok kepada siapa individu mengidentifikasi diri), dan relevansi nilai (sejauh mana sikap berhubungan dengan nilai-nilai pribadi). Melalui ketiga hal itulah makna sikap berakar (Petty & Krosnick, 1995). Sikap terhadap poligami memiliki unsur *self interest* dan relevansi nilai yang cukup tinggi terutama untuk perempuan. Identifikasi sosial terkait masalah poligami di pesantren ini juga tetap sejalan dengan unsur yang lain. Hal ini terjadi karena meskipun pendiri pertama pesantren ini beristri 4 (empat) namun keturunan beliau (sekarang sudah sampai *canggah* atau generasi keempat) tidak ada yang melakukan praktik poligami. Hal ini semakin diteguhkan oleh pengasuh utama generasi pertama yang secara tegas pernah melarang santri untuk poligami dan juga menyetujui putrinya bercerai karena dipoligami suaminya. Di sisi lain, poligami dan pemukulan terhadap istri juga semakin tidak mendapat tempat di masyarakat luas. Konstruksi sosial yang menolak kedua hal tersebut semakin lama semakin menguat. Hal ini semakin melemahkan proses sikap menjadi sebuah perilaku. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar 3 di bawah.

Dinamika hubungan antara sikap dan perilaku di dalam pesantren lebih lanjut dijelaskan terkait bagaimana adaptasi norma berlangsung di pesantren, sikap yang terbentuk dari sosialisasi norma, kematang-

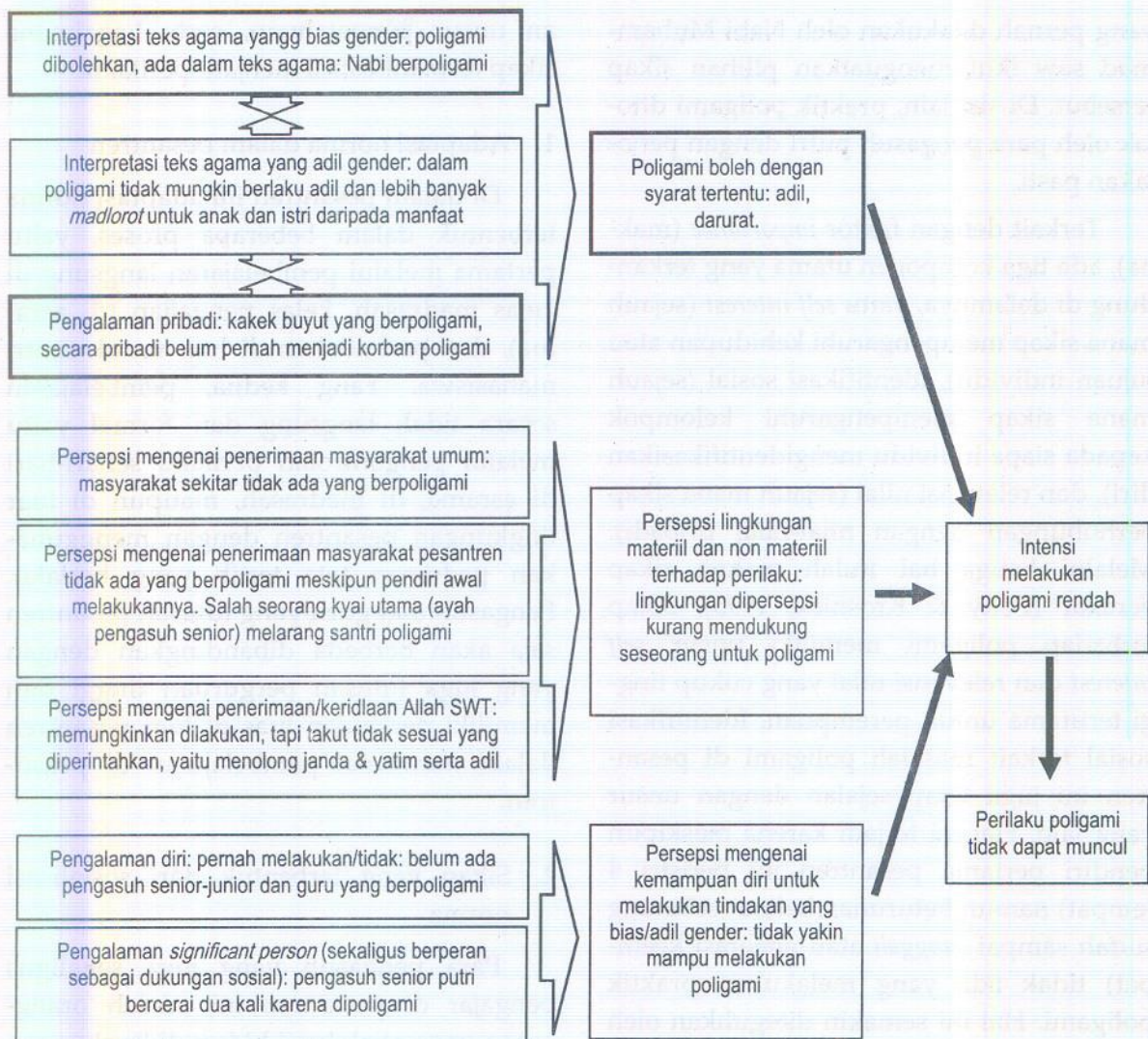
an unsur pengetahuan, serta bagaimana sikap termanifestasi menjadi perilaku.

### 1. Adaptasi norma dalam pesantren

Di dalam pesantren ini adaptasi norma terbentuk dalam beberapa proses, yaitu pertama melalui pembelajaran langsung di kelas madrasah, kelas pengajian (di asrama), dan perkuliahan di luar untuk santri mahasiswa. Yang kedua, pembelajaran secara tidak langsung dan formal yaitu melalui pengontrolan perilaku sehari-hari di asrama, di madrasah, maupun di luar lingkungan pesantren dengan menggunakan pedoman tata tertib yang berlaku. Pengasuh dan guru yang lulusan pesantren saja akan berbeda dibandingkan dengan yang juga lulusan perguruan tinggi dan memiliki pergaulan luas di luar pesantren dalam mewarnai pembelajaran di pesantren.

### 2. Sikap yang terbentuk dari sosialisasi norma

Para pengasuh yang juga sekaligus pengajar di pesantren ini adalah orang-orang yang sejak kecil hidup di lingkungan yang sama yaitu pesantren karena mereka semua adalah anak keturunan pendiri pesantren. Norma yang didapatkan melalui pengasuhan dari kecil sekaligus pembelajaran di pesantren akan mengakar kuat dalam skema kognitif. Sebagaimana dikemukakan, skema kognitif digunakan sebagai bahan memproses dan mengevaluasi segala informasi sosial dari dunia luar. Unsur evaluatif dalam pemrosesan informasi itulah sikap. Sikap yang terbentuk melalui proses yang lama dan dalam berbagai media disertai keberadaan seseorang yang lebih banyak dalam situasi dan lingkungan yang sama akan menguatkan sikap (Petty dan Krosnick, 1995).



Gambar 3. Hubungan Sikap-Perilaku: Poligami di Pesantren

Sebagaimana didapatkan dalam penggalan data, pesantren ini juga menganut konsep terbuka. Sesuai konsep pendiri, pesantren ini dikonsepsi menjadi pesantren yang terbuka. Tidak ada gerbang yang melingkupinya. Pesantren seperti ini pula yang merupakan model pesantren-pesantren tua yang ada di Indonesia (Dirdjosanjoto, 1999). Hubungan dengan masyarakat yang terjalin memberikan konsekuensi bahwa segala hal yang ada di dalam pembelajaran di pesantren dapat dikontrol langsung oleh masyarakat. Pembelajaran di pesantren secara tidak lang-

sung harus mempertimbangkan tradisi, kebiasaan, dan norma yang berkembang di masyarakat sekitar. Interaksi sosial yang telah lama terjalin harmonis ini akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. Penerimaan masyarakat akan menjadi salah satu acuan dalam memilih sikap dan tindakan. Bila tidak, pesantren akan terisolasi dari masyarakat sekitar maupun yang lebih luas. Bila hal itu terjadi, tujuan dakwah yang menjadi tugas utama pesantren terancam gagal atau minimal sulit dilakukan.

### 3. Unsur pengetahuan yang belum matang

Beberapa guru dan pengasuh cenderung mendiskreditkan wacana mengenai gender. Dalam beberapa hal, gender selama ini diasosiasikan dengan pendobrakan tradisi dan kemapanan, anti laki-laki, merusak tatanan, dan juga diasosiasikan dengan beberapa aktivis gender yang cenderung 'galak' dalam melakukan sosialisasi gender. Menurut penelitian Peltola, Milkie, dan Presser (2004), beberapa kelompok orang yang sebenarnya sepakat dengan wacana dan gerakan adil gender pun menolak disebut sebagai feminis karena stigma feminis yang cenderung negatif. Konsep-konsep keadilan gender yang dirumuskan sejalan dengan teks-teks utama agama Islam yaitu al Qur'an dan Hadits belum dipahami betul oleh orang-orang pesantren karena belum mau menyempatkan diri membaca dan mempelajari penafsiran-penafsiran yang lebih adil gender. Di sisi lain, sikap dan perilaku yang tidak bias gender lebih berkembang dalam masyarakat. Dari sanalah muncul kehati-hatian dalam bersikap dan berperilaku sehingga tidak menjadi ekstrim karena menjaga keharmonisan lingkungan sekitar juga merupakan sikap dan perilaku orang pesantren.

Pengetahuan yang benar dan utuh mengenai objek sikap akan merupakan kekuatan sikap akan membuatnya relevan dengan perilaku yang dimunculkan (Petty dan Krosnick, 1995). Unsur pengetahuan yang belum matang terkait dengan masalah reproduksi juga tercermin pada santri. Kekhawatiran, ketidakterbukaan, dan rasa malu yang masih juga muncul bila harus mengkomunikasikan permasalahan reproduksi masih dialami para santri.

### 4. Perilaku yang muncul

Evaluasi seseorang seringkali tercampur dan terdiri dari dua reaksi baik positif

maupun negatif. Hal ini disebut *attitudes ambivalence*. Ambivalensi sikap ini muncul ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan sikap yang sama kuat (Baron dan Byrne, 1998). Sikap yang paling memungkinkan untuk dimunculkan dalam situasi dan lingkungan tertentu itulah yang akan muncul dalam bentuk perilaku. Misalnya, pendapat pengasuh dan guru mengenai pemukulan istri karena nusyuz. Interpretasi yang ada di dalam kitab klasik adalah sebagaimana yang nampak secara makna denotatif yaitu memukul (*wadlribuuhunna*). Di sisi lain, ada interpretasi lain yang cenderung menonjolkan pergaulan yang arif, pendekatan musyawarah, dan menonjolkan unsur kasih sayang. Juga, penerimaan masyarakat umum dan perundang-undangan yang semakin tidak *favorable* terhadap tindakan pemukulan terhadap istri. Hal ini kemudian menyebabkan tidak munculnya sikap tersebut dalam perilaku. Begitu pula dalam penyikapan terhadap pernikahan dini dan poligami.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian keadilan gender dan kesehatan reproduksi di pesantren ini dapat disimpulkan bahwa:

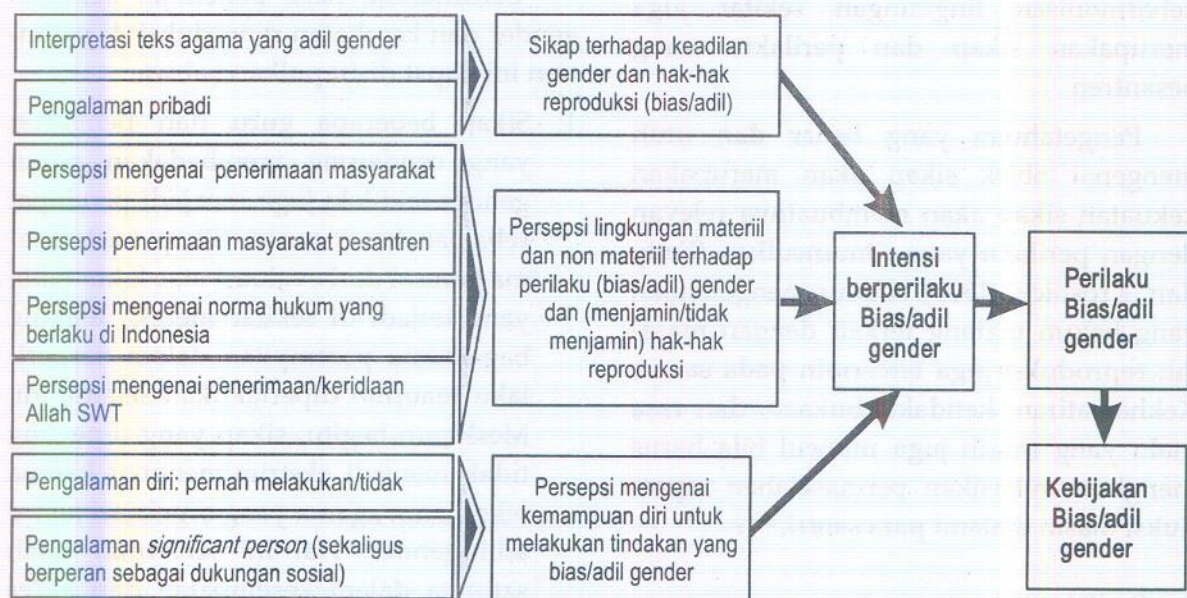
1. Sikap beberapa guru dan pengasuh yang cenderung membedakan peran gender laki-laki juga menjadi pendapat sebagian besar santri. Sikap ini terutama berasal dari evaluasi atas fakta-fakta yang terjadi di sekitar mereka tentang bagaimana perempuan dalam berperilaku maupun diperlakukan selama ini. Meskipun begitu, sikap yang dipegang tidak menjadi ekstrim/menguat karena teks ajaran agama yang dipelajari justru adil gender. Hal ini tercermin salah satunya dalam kesempatan dan akses pendidikan yang relatif sama untuk santri laki-laki dan perempuan.

2. Terkait masalah reproduksi perempuan, sikap mayoritas subjek yang kurang adil terhadap perempuan justru berdasar interpretasi teks agama, misalnya terkait poligami, pemukulan terhadap perempuan yang membangkang, dan pernikahan dini. Hanya saja, sikap mereka pun tidak kuat apalagi termanifestasi dalam perilaku karena tidak sejalan dengan konstruksi sosial yang ada.
3. Mayoritas sikap subjek setuju bahwa perlu ada layanan kesehatan reproduksi khusus terutama untuk santri perempuan karena secara biologis berbeda, lebih kompleks fungsi dan proses yang dialaminya. Hanya saja, dalam kenyataannya justru menggambarkan perlakuan atas layanan kesehatan laki-laki dan perempuan yang sama, tidak dibedakan.

Dinamika hubungan sikap-perilaku tersebut peneliti simpulkan dalam gambar 4 berikut.

### Saran

1. Bagi pesantren. Wacana keadilan gender dan hak-hak reproduksi sesungguhnya sangat sesuai dan sama sekali tidak bertolak belakang dengan Islam. Prinsip kesetaraan, keadilan, pergaulan yang ma'ruf, kasih sayang, dan mengedepankan musyawarah yang kesemuanya menjadi prinsip dasar al Qur'an yang seharusnya dikedepankan dalam membangun peradaban manusia.
2. Bagi aktivis gender. Kritik yang terlalu radikal terkait dengan pedoman tingkah laki, tradisi pembelajaran, dan referensi yang khas pesantren justru melemahkan gerakan yang semula bertujuan menawarkan wacana lain yang lebih adil gender karena pesantren sangat kuat dalam penjagaan dan penghormatan tradisi. Pemakaian sumber yang sama yaitu teks agama lebih dapat diterima dan lebih mudah menggoyahkan sikap yang telah mapan. Pesantren selalu mengusahakan untuk menjaga interaksi sosial yang harmonis dengan



Gambar 4. Dinamika Hubungan Sikap-Perilaku-Kebijakan di Pesantren

masyarakat. Konstruksi sosial yang adil gender perlu diperkuat agar melemahkan sikap yang bias.

3. Bagi keilmuan psikologi sosial dan psikologi gender. Dalam penelitian sosial pada masyarakat yang religius, perlu pengetahuan mengenai ragam interpretasi teks karena hal itulah yang sebenarnya nyata dalam peta kognisi manusia. Selain itu, perlu pendekatan *indigenous psychology* untuk mengetahui ragam makna dalam berbagai aspek kehidupan dalam pesantren.

### Kepustakaan

- Abdullah, I. (2001). *Seks, gender, dan reproduksi kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Baron, R.A. & Byrne, D.E. (1998). *Social psychology: understanding human interaction*. Boston, M.A.: Allyn & Bacon.
- Beall, A.E. & Sternberg, R.J. (1993.). *The Psychology of gender*. New York: Guilford Press.
- Brigham, J.C. (1991). *Social psychology*. Second Edition. New York: Harper Collins Publisher Inc.
- Browner, C.H. (2000). Situating women's reproductive activities. *Journal of American Anthropologist*, 102 (4). 773-789.
- Burns, A. A., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (1999). *Bila perempuan tidak ada dokter*. Yogyakarta: Insist Press.
- Chodorow, N. (2002). The cycle completed: mothers and children. *Feminism and Psychology*, 12 (1), 11-17
- Clark, J. (2004). Slow progress to reproductive rights. *Canadian Medical Association. Journal*, 171 (8), 841-842.
- Cross, S.E. & Markus, H.R.. (1993). Gender in thought, belief, and ction: a cognitive approach. In Beall, A.E. & Sternberg, R.J. (eds.). *The Psychology of Gender*. New York: Guilford Press.
- De La Rey, C. & Kottler, A. (1999). Societal transformation: gender, feminism and psychology in south africa. *Feminism and Psychology*, 9 (2), 119-126
- Dirdjosanjoto, P. (1999). *Memelihara umat: kiai pesantren – kiai langgar di jawa*. Yogyakarta: LKIS.
- Duindam, V. & Spruijt, E. (2002). The reproduction of fathering. *Feminism and Psychology*, 12 (1), 28-32.
- Fakih, M. (2004). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Grown, C., Gupta, G.R., & Pande, R. (2005). Taking action to improve women's health through gender equality and women's empowerment. *The Lancet*, 365 (9458), 541-544.
- Hakimi, M., Hayati, E.N., Marlinawati, V.U., Winkvist, A., & Ellsberg, M.C. (2001). *Membisu demi harmoni. "kekerasan terhadap istri dan kesehatan perempuan di jawa tengah, indonesia*. Yogyakarta: LPKGM-FK UGM.
- Hayati, E.N. (1999). *Kekerasan terhadap istri: studi kasus di rifka annisa women's crisis center yogyakarta. Laporan Penelitian (tidak diterbitkan)*. Yogyakarta: Kerjasama Puslitkes Atmajaya Jakarta dengan Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta
- Kaplan, C.P., Erickson, P.I., & Reyes, M.J. (2002). Acculturation, gender role orientation, and reproductive risk-taking behavior among latina adolescent family planning clients. *Journal of Adolescent Research*, 17 (2), 103-121.
- Marhumah. (2009). *Gender dalam lingkungan sosial pesantren: studi tentang peran kiai dan nyai dalam sosialisasi gender di Pesantren Al munawwir dan*

- Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. *Disertasi*. Tidak Diterbitkan.
- Peltola, P., Milkie, M.A., & Presser, S. (2004). The "feminist" mystique, feminist identity in three generation of women. *Gender & Society*, 18 (1), 122-144.
- Petty, R.E. & Krosnick, J.A. (1995). *Attitude strength: antecedents and consequences*. Hillsdale: NJ: Erlbaum.
- Sciortino, R. & Smith, I. (1997). *Kemenangan harmoni pengingkaran keke-  
rasan domestik di Jawa. Jurnal Perempuan*, 03, 30-34.
- Soebahar, A.H. & Usman, H. (1999). *Hak reproduksi perempuan dalam pandangan kiai*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Umar, N. (1999). *Argumen kesetaraan jender: perspektif alqur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Publikasi Media:  
Kompas, 15 Mei 2008.